

Analisis Partisipasi Investor dalam Menyampaikan LKPM Online: Studi Kasus di Kabupaten Klungkung (*Analysis of the Investor's Participation in Delivering Online LKPM: Case Study in Klungkung Regency*)

Ni Luh Putu Suryani^{1*}, Ida Ayu Putu Sri Widnyani², Nyoman Diah Utari Dewi³

Universitas Ngurah Rai, Bali^{1,2,3}

niluhputusuryani85@gmail.com^{1*}, dayusriwid@gmail.com², diah.utari@unr.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 26 Agustus 2024

Revisi 1 pada 15 September 2024

Revisi 2 pada 5 Januari 2025

Revisi 2 pada 14 April 2025

Disetujui pada 16 April 2025

Abstract

Purpose: The purpose of this research is to improve the effectiveness of the targeted monitoring system so that it can increase the responsiveness and participation of investors in submitting LKPM online. And also to identify and analyze the factors that become obstacles that hinder such participation. So that the government can monitor investment developments, ensure smooth business and provide an outline in formulating future policies, in order to create a conducive investment climate in Klungkung Regency.

Research methodology: This research uses a qualitative method. With data collection techniques through interviews, observations and documentation. The sampling technique uses purposive sampling, on 35 business actors in the Klungkung Regency area. With a qualitative analysis method, using data triangulation analysis techniques, namely combining data from interviews, observations and documentation.

Result: The results of this study show a correlation between the low level of online LKPM submission and the level of investor participation in Klungkung Regency, which is still relatively low. And also obtained a picture of the causal factors originating from internal factors and external factors of investors. And obtained several alternative solutions to overcome it, including competency development, information system development, improving infrastructure quality, implementing socialization, providing technical assistance, and periodic supervision.

Limitation: The limitations of this research are, with a small number of participants, namely 35 investors, it certainly cannot represent a wider population or cannot be generalized to all investors. This research was also conducted in a short time, so it could not explore the topic in depth.

Contribution: This research can produce valuable data and information about the level of participation and the factors that influence it. So that it can be used as a basis for further research to evaluate the effectiveness of policies in increasing the participation of investors.

Keywords: *Investment, Klungkung Regency, LKPM Online, Investors.*

How to cite: Suryani, N, L, P., Widnyani, I, A, P, S., Dewi, N, D, U. (2024). Analisis Partisipasi Investor dalam Menyampaikan LKPM Online: Studi Kasus di Kabupaten Klungkung. *Goodwood Akuntansi dan Auditing Reviu* 3(1), 59-72.

1. Pendahuluan

Suatu negara yang memiliki diplomasi yang baik akan mudah menarik investor untuk berinvestasi. Hal utama yang dibutuhkan investor yakni peraturan yang konsisten dan berkepastian hukum dalam jangka panjang. Salah satunya adalah dengan disahkannya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia dengan mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan perizinan. Pendekatan berbasis risiko berarti pengawasan perizinan terhadap usaha-usaha yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.

Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 merupakan sebuah kebijakan publik yang sangat penting dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Menurut Anderson, kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Widodo, 2022). Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya peraturan ini, pemerintah dapat mengawasi perkembangan investasi, memastikan kelancaran operasional usaha dan menyediakan garis besar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan di masa mendatang, demi terwujudnya iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi pelaku usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Pengawasan dan kewajiban pelaku usaha adalah sebuah hubungan timbal balik. Pengawasan terhadap pelaku usaha merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kewajiban pelaku usaha adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebagai konsekuensi dari kegiatan usahanya. Salah satu kewajiban pelaku usaha dalam regulasi tersebut adalah kewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan suatu laporan yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan investasi yang telah dilakukan. Laporan ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi iklim investasi di suatu wilayah. LKPM disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha secara daring melalui website resmi OSS-RBA. Adapun pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM adalah pelaku usaha dengan skala besar, menengah dan kecil. Sedangkan untuk usaha mikro, tidak diwajibkan sesuai dengan Pasal 32 Ayat (5) dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021. Untuk usaha menengah besar atau Non UMK, wajib menyampaikan LKPM setiap triwulan, sedangkan untuk usaha kecil atau UMK wajib menyampaikan LKPM setiap semester. LKPM disampaikan per proyek, atau sejumlah KBLI yang dimiliki.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam regulasi tersebut, peran aktif pelaku usaha sangatlah penting, demi tercapai tujuan terciptanya iklim investasi yang kondusif. Ketika pelaku usaha berperan aktif, secara otomatis tingkat partisipasinya akan meningkat. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang tinggi menandakan adanya peran aktif yang dilakukan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal ini menyampaikan LKPM secara online.

Analisis tingkat partisipasi pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM online menjadi sangat penting karena beberapa alasan:

1. Akurasi Data Investasi

Data LKPM online yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif. Data ini juga dapat digunakan untuk memantau perkembangan investasi secara real-time. Data yang terstruktur dengan baik dapat dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tren, peluang, dan tantangan dalam investasi. Data investasi yang akurat dan terkini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Sehingga pemerintah dapat merancang kebijakan investasi yang lebih efektif dan efisien.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Kewajiban menyampaikan LKPM secara online mendorong transparansi dalam dunia usaha. Investor menjadi lebih akuntabel terhadap komitmen investasinya. Dengan sistem online, peluang terjadinya manipulasi data menjadi lebih kecil. Sehingga proses pengambilan keputusan terkait investasi menjadi lebih transparan karena data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dapat diakses secara terbuka.

3. Identifikasi Kendala Investasi

Dengan kewajiban pelaporan berkala, kendala yang muncul dapat segera teridentifikasi. Data yang terkumpul secara real-time memungkinkan pemerintah untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi di lapangan. Dengan menganalisis LKPM online, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh investor dalam menjalankan investasinya. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

4. Evaluasi Kebijakan Investasi

LKPM online dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanaman modal, apakah target investasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan menganalisis LKPM, pemerintah dapat mengidentifikasi kebijakan yang berhasil dan kemudian direplikasi di daerah lain. Dan apabila terdapat kebijakan yang kurang efektif, maka dapat segera dilakukan perbaikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa peran aktif pelaku usaha sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan dibuatnya kebijakan terkait pengawasan pelaksanaan penanaman modal tersebut. Akan tetapi, fenomena yang terjadi adalah masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan usahanya, khususnya dalam menyampaikan LKPM online, sesuai dengan lokasi penelitian ini yaitu di wilayah Kabupaten Klungkung, tingkat partisipasi pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM sangatlah rendah. Hal ini digambarkan dalam tabel berikut :

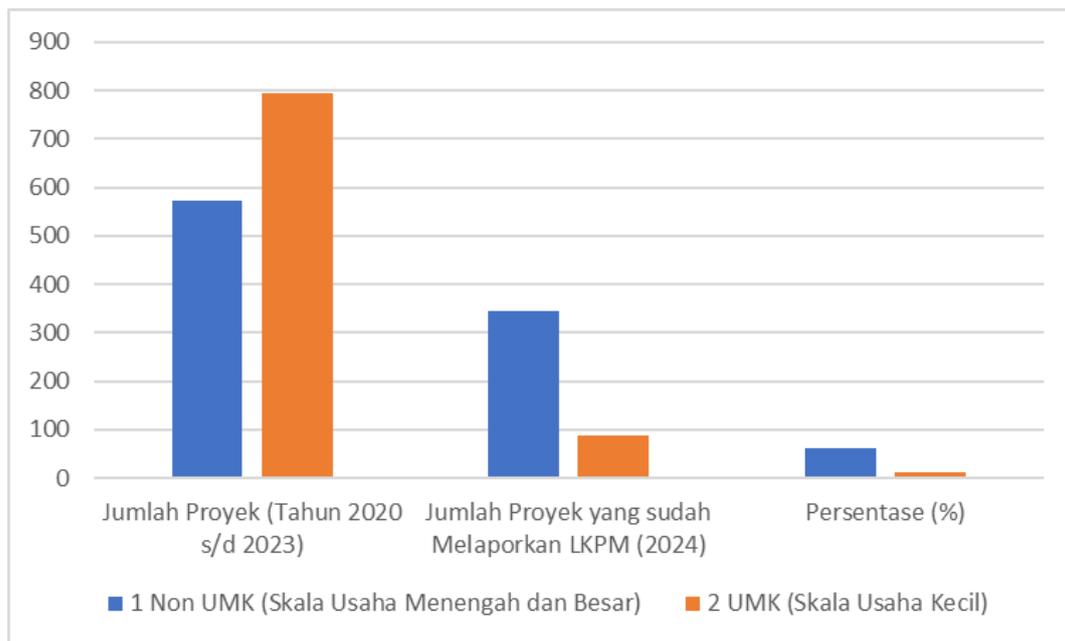
Tabel 1. Data Jumlah Pelaku Usaha yang Sudah Menyampaikan LKPM Online (Per Proyek)

No.	Skala Usaha	Jumlah Proyek (Tahun 2020 s/d 2023)	Jumlah Proyek yang sudah Melaporkan LKPM (Tahun 2024)	Persentase (%)
1	Non UMK (Skala Usaha Menengah dan Besar)	572	346	60,49
2	UMK (Skala Usaha Kecil)	793	87	10,97

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Data di atas penulis ambil dari website resmi OSS-RBA yaitu www.oss.go.id, dimana data yang diambil adalah data jumlah proyek usaha dari tahun 2021 semenjak efektifnya OSS-RBA sampai dengan tahun 2023. Data tersebut disandingkan dengan data LKPM Triwulan 1 Tahun 2024 untuk pelaporan Non UMK, dan data LKPM Semester 1 Tahun 2024 untuk pelaporan UMK.

Untuk lebih jelas, data tersebut juga bisa digambarkan dengan gambar berikut ini:



Gambar 1. Data Jumlah Pelaku Usaha yang Sudah Menyampaikan LKPM Online (Per Proyek)
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pelaku usaha di Kabupaten Klungkung, masih sangatlah rendah. Dimana, dari 572 jumlah proyek Non UMK (Skala Usaha Menengah dan Besar) yang wajib dilaporkan, pada periode Triwulan I Tahun 2024, yang melaporkan sejumlah 346 proyek usaha atau 60,49 %. Dan dari 793 jumlah proyek UMK (Skala Usaha Kecil) yang wajib melaporkan pada periode Semester I Tahun 2024, yang melaporkan sejumlah 87 proyek usaha atau 10,97. Jadi, secara keseluruhan dari 1.365 proyek usaha, baru 433 yang melaporkan atau 31,72 %. Dari persentase tersebut, dapat dikatakan bahwa persentase tingkat partisipasi pelaku usaha di Kabupaten Klungkung dalam menyampaikan LKPM sangatlah rendah bahkan tidak sampai 50 %.

Dari gambaran di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan pada penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pelaku usaha di Kabupaten Klungkung dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online, serta apa solusi yang bisa dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Klungkung untuk menindaklanjuti hal tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Cooper dan Schindler, teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Sugiyono, 2024). Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Hermansyah, 2019). Selanjutnya, menurut Histiraludin, partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan (Tahulending et al., 2019).

Slamet menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok yaitu: adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan adanya kemampuan

masyarakat untuk berpartisipasi (Hermansyah, 2019). Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (BKPM RI, 2021). Berdasarkan teori-teori tersebut di atas, maka dapat dirangkum bahwa partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha atau investor di Kabupaten Klungkung, merupakan keterlibatan secara aktif dalam bentuk penyampaian informasi terkait perkembangan pelaksanaan investasinya, yang menjadi implementasi tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan atau menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pelaku usaha di Kabupaten Klungkung dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online. Metode wawancara penulis lakukan dengan wawancara terstruktur yaitu dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada responden baik melalui kuisioner maupun wawancara langsung dengan pelaku usaha yang penulis jadikan responden.

Teknik purposive sampling penulis gunakan karena responden yang dipilih merupakan sumber penting yang akan bisa menjawab semua permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Responden yang diwawancara berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, merupakan pelaku usaha yang responsif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan. Dan untuk mempertegas data dan memperkuat hasil penelitian, penulis juga melakukan wawancara mendalam pada Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada DPMPTSP Kabupaten Klungkung yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Untuk lebih mendapatkan data yang akurat, kami juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di DPMPTSP Kabupaten Klungkung, begitu juga data yang ada pada OSS-RBA.

Adapun pertanyaan yang peneliti berikan kepada 35 responden pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah Anda mengetahui tentang Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021?
 - Iya
 - Tidak
2. Apakah Anda mengetahui kewajiban Anda sebagai pelaku usaha berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021?
 - Iya
 - Tidak
3. Apakah Anda pernah mendapatkan informasi terkait LKPM Online?
 - Pernah
 - Tidak Pernah
4. Jika pernah, darimana Anda mendapat informasi tersebut?
.....
5. Apakah Anda sudah menyampaikan LKPM Online?
 - Sudah
 - Belum
6. Jika belum, silahkan tulis alasannya di bawah ini beserta kendala yang Anda hadapi.
.....

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam Profil Investasi Kabupaten Klungkung (2023) disebutkan secara fisik wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya atau sekitar 10.493,57 Ha terletak di daratan Pulau Bali dan dua pertiganya atau sekitar 20.784,62 Ha lagi merupakan daerah kepulauan yaitu : Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Kabupaten Klungkung memiliki 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida dengan 59 desa/kelurahan, 241 dusun, 106 desa adat dan 393 banjar adat. Kecamatan Nusa Penida memiliki luas terbesar diantara kecamatan-kecamatan lain yang terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 64,39.

Pertanian masih menjadi sektor primer atau utama penopang perekonomian masyarakat Klungkung. Kecamatan Nusa Penida dominan dengan hasil pertanian rumput laut dan perikanan tangkap, Kecamatan Banjarangkan dominan dengan hasil hortikultura, Kecamatan Klungkung dengan hasil padi dan hortikultura, serta Kecamatan Dawan yang dominan dengan hasil padi, palawija dan perikanan. Industri yang berkembang di Kabupaten Klungkung sebagai sektor sekunder didominasi oleh industri kain tenun endek dan songket. Selain itu terdapat industri makanan, minuman, barang dari kayu, barang dari kertas, dan barang dari logam.

Potensi investasi sektor tersier yang dikembangkan di Kabupaten Klungkung adalah hotel dan restoran yang sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Nusa Penida. Perkembangan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai 106,496 milyar menurut BPS Provinsi Bali. Ini termasuk peningkatan angka investasi dari tahun sebelumnya mencapai 66,996 milyar. Sementara perkembangan investasi penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 dengan realisasi investasi mencapai 164,481 milyar. Ini merupakan peningkatan angka investasi dari tahun sebelumnya yang mencapai 123,249 milyar. Total PMDN dan PMA terealisasi mencapai 270,977 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 190,245 milyar (DPMPTSP Kab. Klungkung, 2023).

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan atau menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pelaku usaha di Kabupaten Klungkung dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online. Metode wawancara penulis lakukan dengan wawancara terstruktur yaitu dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada responden baik melalui kuisioner maupun wawancara langsung dengan pelaku usaha yang penulis jadikan responden. Adapun hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Wawancara dengan 35 Responden

No.	Nama	Nama Usaha	Alamat Usaha	Pertanyaan					
				1	2	3	4	5	6
1	Ni Putu Tirtayasih	Jukung Mart dan Jukung Cottage	Jl Raya Sampalan Nusa Penida	Iya	Iya	Pernah	Dalam kegiatan rutin terkait LKPM	Sudah	Kadang ada eror saat input data
2	Yulia Rahmawati	Apotek Kusamba	Jl. Diponegoro No.82 Semarapura Klungkung	Iya	Iya	Pernah	Dari monitoring petugas di kantor dinas DPMPTSP	Sudah	Kendala waktu, karena belum ada SDM yg bisa diserahkan tugas untuk mengerjakan laporan-laporan
3	Gunardi	PT. Sinta Marine Citraprasada	Jl. Raya Kusamba Banjar Tribhuwana Klungkung Bali	Tidak	Tidak	Pernah	Dinas Perijinan Kabupaten Klungkung saat	Belum	Ada permasalahan pada KBLI nya, dan tidak cukup mengerti

No.	Nama	Nama Usaha	Alamat Usaha	Pertanyaan					
				1	2	3	4	5	6
							dikunjungi ke lokasi		
4	Ni Kadek Dwipayanti	Klinik Pratama Grya Candra	JL. Raya Besakih, No. 125, Desa Akah, Klungkung	Iya	Iya	Pernah	Informasi saya dapatkan dari petugas pengawasan Dinas Penanaman Modal Kab. Klungkung	Sudah	Kendala dalam penyampaian LKPM Online, kadang lupa jadwal dan ada pemahaman tentang LKPM masih kurang, jadi kebingungan dalam pengisian
5	I Wayan Bagiayasa	Nusa Veranda Sunset Villa	Dusun Ceningan Kawan, Desa Lembongan	Tidak	Tidak	Pernah	Dinas Perijinan Kabupaten Klungkung saat monitoring	Sudah	Kendala pada jaringan internet
6	Lika Diah Damayanti	Kayuna Villa	Banjar Prapat Desa Ped Nusa Penida	Iya	Iya	Pernah	Dari dinas terkait saat pengawasan	Sudah	Tidak ada kendala
7	Ni Komang Novita Krisna Dewi	Tanah Damai Hotel	Jalan Gamat Bay, Desa Sakti Nusa penida	Tidak	Tidak	Pernah	Dari dinas penanaman modal klungkung saat bimtek	Belum	Belum bisa migrasi data ke ossrba karena peraturan yg berubah-ubah
8	I Ketut Jindra	Sebrang Hills	Banjar Adegan, Ped, Nusa Penida Klungkung	Iya	Iya	Pernah	Dari sosialisasi atau bimtek	Sudah	Tidak ada kendala
9	Ingrid Irawan	Tanah Penida Bungalows	Br. Adegan Kangin Ds. Ped Kec. Nusa Penida. Klungkung - Bali 80771	Tidak	Tidak	Pernah	Google	Sudah	Kadang terkendala jaringan internet
10	Ni Wayan Luh Kuniyanti	Maruti Beach Club	Br. Nyuh Desa Ped Nusa Penida	Tidak	Tidak	Pernah	Dari bimtek	Belum	Diminta untuk migrasi data
11	Dewa Ayu Kusumasari	CV. Gangga Express	Dsn. Bias, Kusamba, Dawan, Klungkung	Iya	Iya	Pernah	Dari dinas perijinan saat bimtek	Belum	Karena blm faham cara menginput nominal yg harus di masukan dalam lkpm
12	I Wayan Kariasa	Arsa Santhi Penida Hotel	Br. Nyuh, Ped, Nusa Penida	Iya	Iya	Pernah	Bimtek dari DPMPSTSP Klungkung	Belum	Belum bisa/ragu menginput data laporan
13	I Gusti Putu Darma Susila	PT Bintang Kembar Klungkung	Jl Raya Kusamba No. 88 Br Bias Kusamba Klungkung	Tidak	Tidak	Pernah	Informasi dari petugas DPMPSTSP saat acara bimtek	Belum	Sedikit belum paham dengan alur nya
14	Yuyun	PT. Fu Ming International Food	Banjarangkan Klungkung	Iya	Iya	Pernah	Email	Sudah	Kadang lupa
15	Septi Widia	Sugar Daddy Gelato dan Sapodilla Restoran	Toyapakeh Nusa Penida	Tidak	Tidak	Pernah	Pengawasan dari dinas terkait	Belum	Kendala informasi

No.	Nama	Nama Usaha	Alamat Usaha	Pertanyaan					
				1	2	3	4	5	6
16	Gusti Ayu Agung Dian Puspita Dewi	Klinik Agung Medika	Dusun Mungguna Desa Tihingan	Iya	Iya	Pernah	Dinas Perijinan Kabupaten Klungkung pada saat mengikuti bimtek	Belum	Karena peralihan pegawai
17	Ni Wayan Sutriani	CV. Arsa Winangun	Jl. Sedap Malam Kelurahan Semarang Klod	Iya	Iya	Pernah	Setiap mengikuti sosialisasi dari Dinas Perijinan Kabupaten Klungkung	Belum	Karena ada kendala dalam penginputan pelaporan
18	Hari Winata	PT. Putra Dewata Sejati	Jl. Bypass Ida Bagus Mantra Gelgel Klungkung	Iya	Iya	Pernah	Dari teman kerja	Belum	Lupa
19	Ni Luh Ketut Konita Wulansari	PT. Sanjaya Thanry Bahtera	Jl. Kresna Semarang Klod Kangu Klungkung	Iya	Iya	Pernah	Monitoring dari Dinas Penanaman Modal Pemerintahan Kabupaten Klungkung	Sudah	Tidak ada kendala
20	Ni Kadek Fitri Cahyani	LPK Glory International Cruise Knowledge	Jl. Ngurah Rai Kab. Klungkung	Iya	Iya	Pernah	Dari sosialisasi atau bimtek	Sudah	Tidak ada
21	Anak Agung Istri Wirat	LPK Grandiozza International Hospitality	Jl. Raya Tojan No. 88 Takmung Klungkung	Iya	Iya	Pernah	Bimtek	Belum	Karena permasalahan pada akun yang harus diperbaiki
22	I Komang Ardayana	PT. Delta Satria Dewata	Banjar Pancingan, Desa Kusamba Kecamatan Dawan	Tidak	Tidak	Pernah	Sosialisasi dari DPMPTSP	Belum	Kurang paham
23	Siluh Ayu Made Dwita Adriani	RSU Bintang	Jl. Ngurah Rai 10 Semarang	Iya	Iya	Pernah	WA Group LKPM, Bimtek dan Email	Belum	Terkadang tidak kirim, karena ada kendala/eror saat pengisian
24	I Wayan Jhonny Friandika	Pondok Wisata Bella Kita	Jl. Bukit Abah	Tidak	Tidak	Pernah	Bimtek	Belum	karena eror pada sistem
25	Ni Kadek Mariani	PT. Bintang Bali Indah	Desa Kusamba, Klungkung	Iya	Iya	Pernah	Sosialisasi dari DPMPTSP	Sudah	Adanya pergantian pegawai, kadang menyebabkan keterlambatan pelaporan
26	I Putu Agus Arsana Diantara	Dian's Rumah Songket	Dusun Pegatepan, Gelgel Klungkung	Tidak	Tidak	Pernah	Sosialisasi	Belum	Kurang perhatian
27	Ni Komang Sri Armini	PT. Murya Sari Abadi	Jl. Kecubung No. 22 Semarang	Iya	Iya	Pernah	Dari atasan	Sudah	Sering adanya pergantian petugas
28	Upadianti	PT. Resdiyoga Krya Husada	Negari Klungkung	Iya	Iya	Pernah	Internet	Sudah	Tidak ada
29	Tirta	PT. Seraya Berjaya	Banjarangkan Klungkung	Tidak	Tidak	Pernah	Bimtek	Belum	Belum paham

No.	Nama	Nama Usaha	Alamat Usaha	Pertanyaan					
				1	2	3	4	5	6
30	Juhriah	Hotel Tegar Paradise	Desa Sakti, Kec. Nusa Penida	Iya	Iya	Pernah	Dari pelatihan yang saya ikuti	Belum	Karena saya belum paham dan mengerti caranya
31	I Gede Selamet Satiya	PT. Love Nusa Penida	Jl. Raya Adegan, Desa Ped Kec. Nusa Penida	Tidak	Tidak	Pernah	Dari petugas DPMPTSP saat monitoring	Belum	Karena tombol kirim tidak aktif
32	I Komang Mudiarini	Coco Tree Spa	Jl. Tanjung Akuh, Dusun Sebnibus, Desa Sakti Nusa Penida	Iya	Iya	Pernah	Bimtek	Sudah	Belum sepenuhnya paham
33	I Made Sukrawan	The Abasan	Desa Sakti Nusa Penida	Iya	Iya	Pernah	Bimtek	Sudah	Belum paham betul
34	Ivo MS.	Nusa Medica Clinic	Jl. Raya Toya Pakeh, Ped, Nusa penida	Iya	Iya	Pernah	Dari monitoring petugas DPMPTSP	Sudah	Sering lupa
35	Komang Kamartina	Ari La Casa Guest House	Br. Nyuh Desa Ped Kec. Nusa Penida	Tidak	Tidak	Pernah	Saat petugas datang ke lokasi usaha	Belum	Tidak mengerti tentang LKPM

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel wawancara dengan 35 orang responden di atas, maka didapatkan hasil bahwa semua responden telah mengetahui tentang kewajibannya dalam menyampaikan LKPM online. Adapun informasi LKPM tersebut didapatkan dari bimtek atau sosialisasi sebanyak 20 orang atau 57,14 %, monitoring atau pengawasan lapangan oleh tim dari DPMPTSP Kabupaten Klungkung sebanyak 10 orang atau 28,57 %, dari internet 2 orang atau 5,71 %, dari pimpinan atau atasan sebanyak 2 orang atau 5,71 % dan dari email 1 orang atau 2,86 %.

Dan dari 35 responden tersebut, 16 orang atau 45,71 % sudah menyampaikan LKPM online, dan 19 orang atau 54,29 % yang belum menyampaikannya. Hal tersebut dengan disertai alasan dan kendala dari faktor internal dan faktor eksternal. Disebabkan oleh faktor internal sebanyak 22 orang atau 62,86 %, faktor eksternal sebanyak 8 orang atau 22,86 % dan 5 orang atau 14,29 % menyatakan tidak ada kendala.

Jika dirangkum, maka didapatkan alasan dan kendala yang dipengaruhi oleh faktor internalnya antara lain :

- a. Kendala peralihan pegawai atau terbatasnya SDM;
- b. Belum paham atau belum cukup mengerti; dan
- c. Kendala karena lupa.

Aalasan dan kendala yang dipengaruhi oleh faktor eksternalnya antara lain :

- a. Kendala pada jaringan internet;
- b. Sistem OSS yang terkadang eror; dan
- c. Peraturan yang berubah-ubah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan sebagai informasi tambahan dari hasil wawancara pada Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada DPMPTSP Kabupaten Klungkung, maka hasil pembahasan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah terkait faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pelaku usaha di Kabupaten Klungkung dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online, serta apa solusi yang bisa dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Klungkung untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan kendala yang berasal dari dalam perusahaan atau pelaku usaha itu sendiri yang dapat menghambat penyampaian LKPM secara online. Berikut adalah beberapa faktor internal yang ditemui oleh pelaku usaha di Kabupaten Klungkung:

- a. Kurangnya Sumber daya Manusia (SDM) yang Kompeten
 - Keterbatasan keahlian : tidak semua karyawan memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi dan sistem pelaporan online.
 - Beban kerja yang tinggi : karyawan seringkali memiliki beban kerja yang tinggi sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menyelesaikan LKPM.
- b. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya LKPM
 - Tidak memahami manfaat : banyak pelaku usaha yang belum memahami manfaat dan menyampaikan LKPM secara tepat waktu, seperti mendapatkan kemudahan dalam mengakses perizinan atau mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah.
 - Anggapan tidak penting : beberapa pelaku usaha menganggap bahwa LKPM hanya merupakan formalitas belaka dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap bisnis mereka.
- c. Kurangnya Pemahaman tentang LKPM
 - Kesulitan memahami regulasi : banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan memahami regulasi terkait LKPM. Terminology yang kompleks dan perubahan regulasi yang sering terjadi membuat mereka bingung.
 - Tidak mengetahui manfaat LKPM : kurangnya sosialisasi mengenai manfaat menyampaikan LKPM membuat pelaku usaha tidak melihat pentingnya laporan ini bagi bisnis mereka.
- d. Kurangnya Motivasi
 - Kurangnya insentif : tidak adanya insentif atau penghargaan bagi pelaku usaha yang telah menyampaikan LKPM secara tepat waktu dapat mengurangi motivasi mereka.
 - Persepsi negatif : persepsi negative terhadap birokrasi dan prosedur pelaporan yang rumit dapat menurunkan motivasi pelaku usaha.
- e. Beban Administratif
 - Proses pelaporan yang rumit : proses pelaporan LKPM yang dianggap rumit dan memakan waktu membuat pelaku usaha enggan untuk melakukannya.
 - Perubahan data yang sering : perubahan data perusahaan yang sering terjadi membuat pelaku usaha perlu melakukan pembaruan data secara berkala, yang dianggap sebagai beban tambahan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kendala yang berasal dari luar perusahaan atau pelaku usaha yang dapat menghambat penyampaian LKPM secara online. Berikut adalah beberapa faktor internal yang ditemui oleh pelaku usaha di Kabupaten Klungkung:

- a. Regulasi yang sering Berubah
 - Perubahan regulasi yang sering terjadi membuat pelaku usaha kesulitan untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru.
- b. Kualitas Infrastruktur yang tidak Memadai
 - Akses Internet yang Terbatas : keterbatasan akses internet, terutama di wilayah Nusa Penida, menjadi kendala dalam menyampaikan LKPM secara online.
 - Kualitas koneksi yang tidak stabil seringkali menyebabkan gangguan dalam proses pelaporan.
- c. Sosialisasi yang Kurang Efektif
 - Sosialisasi mengenai LKPM yang dilakukan oleh pemerintah seringkali dianggap kurang efektif dan tidak menjangkau semua pelaku usaha.
- d. Sistem OSS yang Sering Error
 - Server OSS yang mengalami gangguan atau sedang dalam perbaikan dapat menyebabkan sistem tidak dapat diakses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada DPMPSTP Kabupaten Klungkung, Bapak I Gede Dodi Hendrawan, ST., menyatakan bahwa:

“Solusi yang dapat kami selaku pemerintah lakukan untuk mengatasi rendahnya tingkat partisipasi pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM online adalah dengan peningkatan infrastruktur yaitu peningkatan akses internet, utamanya di wilayah Nusa Penida. Selain itu, kegiatan sosialisasi ataupun bimtek kami lakukan lebih intensif dan tepat sasaran. Juga kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kami lakukan secara rutin dan lebih sering dalam upaya pelaksanaan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021”.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai Analisis Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha dalam Menyampaikan LKPM Online (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Klungkung), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat partisipasi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Klungkung dalam menyampaikan LKPM secara online masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di wilayah Kabupaten Klungkung belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2021.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pelaku usaha di Kabupaten Klungkung dalam menyampaikan LKPM online terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal pelaku usaha. Adapun faktor internalnya terdiri dari : kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, kurangnya kesadaran akan pentingnya LKPM, kurangnya pemahaman tentang LKPM, kurangnya motivasi, dan anggapan bahwa LKPM itu merupakan beban administratif bagi pelaku usaha. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari : regulasi terkait perizinan berusaha yang sering berubah sesuai dengan perkembangan jaman, kualitas infrastruktur khususnya akses internet yang kurang memadai, sosialisasi terkait LKPM yang belum efektif dan tepat sasaran dan sistem OSS yang kadang-kadang eror karena adanya perbaikan atau pemeliharaan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah Kabupaten Klungkung. Solusi tersebut adalah perusahaan perlu melaksanakan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan, dan dapat meningkatkan kompetensi karyawan dalam bidang teknologi informasi dan sistem pelaporan. Pemerintah dapat mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan user-friendly untuk memudahkan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM. dan perlu meningkatkan kualitas infrastruktur terutama akses internet di wilayah Nusa Penida.

Solusi selanjutnya adalah DPMPTSP Kabupaten Klungkung beserta lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif, efektif, dan tepat sasaran mengenai pentingnya LKPM dan tata cara pelaporannya, didukung dengan bantuan teknis yang lebih komprehensif kepada pelaku usaha, seperti pelatihan dan konsultasi. DPMPTSP Kabupaten Klungkung juga perlu melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin dan lebih sering terkait pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan, terdapat keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini hanya menggunakan 35 orang responden, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya representatif menggambarkan kondisi tingkat partisipasi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Klungkung. Untuk itu, pada penelitian selanjutnya dapat diperluas lagi dari segi jumlah responden maupun variabel-variabel lain, sehingga pada akhirnya didapatkan data yang lebih luas dan akurat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam penelitian ini mulai dari awal sampai akhirnya dapat selesai dengan baik. Kepada para pembaca yang akan membaca penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat.

Referensi

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Andani, Diah. (2022). Implementasi Kebijakan Penanaman Modal dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Subang. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, e-ISSN 2614-2945 Volume 9 Nomor 1. <https://jurnal.unigal.ac.id>.
- Damanik, Boy Andreas. (2022). Tinjauan Yuridis Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. *Jurnal Law Of Deli Sumatera*, Volume II Number 1. ISSN : 2809-5847. <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/159/152>.
- Dayantari. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara. *Sibatik Journal*, Volume 1 No. 5 (April 2022). E-ISSN: 2809-8544. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.69>.
- Febrianti, Rahmi., Ratna Dewi & Ainun Mardiah. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Studies*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019. <https://publicness.ppj.unp.ac.id>.
- Hermansyah. (2019). Partisipasi Sosial dalam Pembangunan (Sebuah Tinjauan Konsep). *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, ISSN 2301-6876. <https://doi.org/10.47030/aq.v9i1.68>.
- Jumadil, Moh. Rizky A., Rahmat Setiawan, Mustating Daeng Maroa, Asis Harianto & M. Ikhwan Rays. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. *Jurnal Yustisiabel*, Volume 7, Nomor 1, April 2023. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/2449>.
- Kusuma, I Wayan Martha Wijaya., A.A. Gede Raka & I Made Sumada. (2022). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, di Desa Canggung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 7 (1) (2022), 12-19. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>.
- Masykur, Firza Agustianti., (2024). Perbandingan Kepuasan Publik atas Pelayanan Online dan Offline pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan (Comparison of Public Satisfaction with Online and Offline Services at the Investment Office and One Stop Integrated Services of South Sulawesi Province). *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP)*, Vol 2, No 2, 2024, 101-116. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i2.2885>.
- Monica, Devita & Dewa Ayu Putu Adhiya Garini Putri. (2023). Meningkatkan Realisasi Investasi Melalui Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM Online Kota Blitar. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.4 No 4, 2023, pp. 2889-2894. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6546>.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2021).
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2014).
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2020).
- Putra, Adrian Pratama. (2022). Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Denpasar. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, ISSN 2747-187X. <https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/mahajana/article/view/2209>.

- Profil Investasi Kabupaten Klungkung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung. (2023).
- Rahayu, Fuji Puspa., Enos Paselle & Thalita Rifda Khaerani. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Publik*, 2021, 9(2): 5018-5032. <https://ejournal.ap.fisip-unmul.org>.
- Rokhman, Bakhrur., Tobirin, Ali Rokhman & Denok Kurniasih. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, Volume 6, Issue 1, June 2024. P-ISSN: 2715-6117, E-ISSN: 2715-6966. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.399>.
- Rosidi, Didi. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang. Volume 4 Issue 2, Desember 2022. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>.
- Samsuri., Juanda, Dwi Atmoko & Ogiandhafiz Juanda. (2023). Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2, Juli-September 2023. e-ISSN: 2829-4580, p-ISSN: 2829-4599. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, Made Prisma Dewi., Ida Ayu Putu Sri Widnyani & I Wayan Astawa. (2023). Pemberian Stimulus PBB-P2 untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Buleleng (Provision of PBB-P2 Stimulus to Encourage Community Participation in Increasing Regional Income in Buleleng district). *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, ISSN 2776-7574 , Vol 3, No 1, 2023, 9-16. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v3i1.1984>.
- Supriadi, Ratna Atika., Miranda Widya Astuti, Siti Darina, Iga Frediani, & Theresia Noline Pigai. (2021). Analisis evaluasi kebijakan publik bantuan tunai: studi kasus bantuan tunai di provinsi Lampung (Analysis of cash aid public policy evaluation: case study of cash assistance in Lampung province). *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, Vol 1, No. 1, 2021, 25-42. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.209>.
- Syaputra, Fajar Tridian. (2024). Efektifitas Program Pembinaan dan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh DPMPTSP Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan LKPM Para Pelaku Usaha di Kota Surabaya. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, Vol 4 No 3 (2024) 2024 – 2033. E - ISSN 2809 - 2058P - ISSN2809 - 2643. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/visa/article/view/3712/3218>.
- Tahulending, Melvin., Welson Y Rompas & Novie Palar. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Kiama Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. *E-Journal UNSRAT*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>.
- Uceng, Andi., Akhwan Ali, Ahmad Mustanir & Nirmawati. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Cemba Kecamatan Enrengkang Kabupaten Klungkung. *Jurnal MODERAT*, Volume 5, nomor 2, Mei 2019, hlm 1-7. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (2007).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020).
- Utari, Tri., (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Karyawan dengan Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening, Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung (The Influence of budget participation to employee performance with organizational culture and worksatis faction-based as intervening variable in Bank Rakyat Indonesia KC. Bandar Lampung). *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, ISSN 2776-7574 , Vol 1, No 2, 2022, 97-110. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1020>.
- Widadi, Teguh & Dwian Hartomi Akta Padma Eldo. (2023). Urgensi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa (Studi di Desa

Wonoyoso Kabupaten Kebumen tahun 2022) (The Urgency of Village Community Empowerment Cadres in Increasing Community Participation in Village Development (Study in Wonoyoso Village, Kebumen Regency in 2022)). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, ISSN 2776-7574, Vol 2, No 2, 2023, 109-120. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1870>.

Widodo, Joko. (2022). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.